

ANTARA TANGGUNG JAWAB PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT : STUDI KASUS SIKAP EDITOR TERHADAP AKUNTABILITAS MEDIA DI SWEDIA

Alifia Sekar Pramesti¹, Marita Eka Putri^{2*}, Siska A. Sufa³

^{1,2,3}*Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Jl. Semolowaru No.84, Surabaya*
Email Korespondensi : maritaeka326@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implementasi dan efektivitas system akuntabilitas media. Secara empiris, artikel tersebut didasarkan pada survei nasional tentang sikap di antara pemimpin redaksi dari 24 surat kabar Swedia terbesar. Dalam survei ini, berbagai jenis sistem akuntabilitas media dievaluasi dan diberi peringkat oleh editor: mekanisme internal, kegiatan eksternal, dan sistem koperasi. Studi kasus tentang sikap editor Swedia terhadap sistem akuntabilitas media yang berbeda ini menegaskan bahwa sampai taraf tertentu mereka lebih memilih sistem yang tidak dianggap sebagai peraturan "luar-dalam". Ketika editor dapat memilih, dimensi hubungan masyarakat dari akuntabilitas media terlihat jelas. Tetapi kemampuan mereka untuk secara eksklusif memilih opsi akuntabilitas menjadi lebih terbatas karena tren globalisasi media, teknologi baru.

Kata Kunci: Humas, Media, Editor

ABSTRACT

This article discusses implementing and having a media accountability system. Empirically, the article is based on a national survey of attitudes among the editor-in-chief of the 24 largest Swedish newspapers. In this survey, different types of media accountability systems are evaluated and ranked by editors: internal, external activities, and cooperative systems. This case study of Swedish editors' attitudes to different media accountability systems is that to some extent they prefer systems that are not considered "outside-in" rules. When editors can vote, the public relations dimension of media accountability is clear. But their ability to exclusively choose accountability options has become more limited due to the globalization trend of media, new technologies.

Keywords: PR, Media, Editor

PENDAHULUAN

Tidak ada demokrasi tanpa pers yang bebas, tetapi pers bebas yang tidak berperilaku profesional, dan dengan tanggung jawab yang besar terkait keputusan penerbitan, juga dapat merugikan nilai-nilai demokrasi. Secara tradisional, pers telah disebut sebagai elemen kunci dalam pengembangan demokrasi, menjamin kebebasan berekspresi, dan bertindak sebagai " keempat, " memeriksa kekuatan institusi yang berpengaruh di masyarakat (Bennett et al., 2007; Schudson, 2008). Dengan demikian, kebebasan pers pada dasarnya telah mendapat perlindungan konstitusional yang kuat dari negara-negara indemokratis. Namun demikian, intervensi negara telah dilaksanakan secara akstensif untuk meningkatkan kondisi ekonomi surat kabar atau untuk memfasilitasi distribusi atau produksi (Hallin & Mancini, 2004). Pada waktu bersamaan, Pengaturan konten

editorial di pers juga dilakukan secara swakelola dan praktek koregulasi, seperti dewan pers dengan campuran industri dan perwakilan awam (Hardy, 2008). Sebagai kesimpulan, kondisi pers secara tradisional dikembangkan di bawah model campuran ide media liberal, peraturan sukarela, dan intervensi negara. Namun, tren media kontemporer internasionalisasi, komersialisasi, dan konvergensi menimbulkan tantangan besar untuk model campuran ini (Jenkins, 2006; Wyss & Keel, 2009). Secara umum, nilai-nilai pengaturan ekonomi telah berlaku dan menekankan pentingnya persaingan media bebas dan pilihan konsumen yang tidak dibatasi (McQuail, 2005). Akibat runtuhnya kebijakan media nasional, pengaturan mandiri industri pers menjadi semakin penting sebagai cara yang lebih konsisten dan memadai untuk mengamankan kualitas media. Lebih lanjut, perkembangan pesat platform media baru seperti Internet telah memperjuangkan model pengaturan bersama dan mandiri (Freedman, 2008).

Selain itu, mungkin sangat relevan untuk menanyakan apakah tanggung jawab sosial media seperti pengaturan mandiri benar-benar bekerja secara efisien dalam lingkungan media yang lebih komersial dan berorientasi pasar. Organisasi media tidak hanya memperjuangkan kualitas jurnalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, standar dan prinsip profesional mungkin tidak selalu sejalan dengan keputusan penerbitan editorial. Persaingan media yang meningkat dan siklus berita 24 jam menantang pertimbangan etis dan menyisakan sedikit ruang untuk refleksi publikasi. Prosedur pemilihan berita biasanya didasarkan pada beberapa jenis kompromi antara norma etika jurnalisme dan tuntutan pasar media (McManus, 2008, hal. 42; Wyss & Keel, 2009, hlm. 127). Akhirnya, Dalam artikel ini, tata kelola media dianggap terutama dari perspektif jurnalistik, dengan fokus pada mekanisme pengaturan diri dan Sistem Akuntabilitas Media (MAS). Akuntabilitas telah berkembang sebagai konsep kunci dalam diskusi swa-regulasi media. Akuntabilitas dan tanggung jawab dapat dilihat sebagai dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama, konsep sebelumnya tidak hanya mendefinisikan, tetapi juga perilaku yang tepat (Bardoel & d'Haenens, 2004).

MAS — perlindungan atau promosi?

Saat menganalisis studi negara-demi-negara tentang tata kelola media di Eropa (Terzis, 2007), pakar media Johannes Bardoel membedakan empat "tata kelola media saat ini pengaturan," empat jenis mekanisme akuntabilitas untuk media: (a) pasar, (b) profesional, (c) politik, dan (d) akuntabilitas publik (Bardoel, 2007, hlm. 446). Akuntabilitas media, konsep yang digunakan dalam artikel ini, dapat dilihat mengandung unsur penting akuntabilitas publik dan profesional dan bahkan beberapa dimensi pasar. Karena tata kelola media didasarkan pada jaringan pengaruh dan kepentingan yang saling terkait, tidak ada batasan yang jelas antara jenis mekanisme yang dibahas di sini. Dengan demikian, akuntabilitas media harus didefinisikan dengan memperhatikan sifatnya yang interaktif dan bervariasi. Akuntabilitas media adalah proses interaktif di mana organisasi media dapat diharapkan atau diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban (dan terkadang koreksi dan / atau alasan) dari aktivitas mereka kepada konstituen mereka. Nilai dan kekuatan relatif dari konstituen bervariasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh sistem media dan teknologi media (von Krogh, 2008a, hal 27). Akuntabilitas media juga dapat ditangani dalam konteks hukum dan sukarela. Yang pertama mengacu pada klaim yuridis (pertanggungjawaban) ketika kerusakan disebabkan, sedangkan yang terakhir mengacu pada tindakan sukarela

media atau tanggapan terhadap kritik konten dan pertunjukan (kemampuan menjawab) (McQuail, 2003).

Salah satu pelopor dalam hal mempelajari berbagai cara praktis untuk menyediakan akuntabilitas media adalah peneliti Prancis Claude-Jean Bertrand. Bertrand mulai dengan studi dewan pers pada tahun 1970-an dan kemudian memeriksa ulasan jurnalisme lokal di Amerika Serikat, yang pada saat itu diterbitkan di 8 dari 10 kota terbesar di negara itu. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke ombudsman dan terakhir ke kode etik media. Secara bertahap, dia mengembangkan konsep MAS, yang dia definisikan sebagai: setiap non-negara berarti membuat media bertanggung jawab terhadap publik. Karena konsepnya global, jadi agak kabur. Ini mencakup individu dan kelompok, pertemuan rutin, dokumen tertulis, media kecil atau proses panjang atau pendekatan tertentu. Biasanya, MAS bertindak hanya dengan tekanan moral (Bertrand, 2000, hal 107).

Bertrand membahas MAS dalam tiga kategori: (a) internal, (b) eksternal, dan (c) koperasi. Mekanisme internal meliputi standar dan preferensi pribadi, budaya organisasi, dan standar profesional. Mekanisme kontrol eksternal dapat berupa komite pengawas atau berbagai bentuk pemantauan eksternal. Mekanisme kerja sama bisa berupa dewan pers, dengan perwakilan pemilik media, jurnalis, dan publik. Dalam pandangan Bertrand, sistem dalam kategori terakhir ini — saat berfungsi dengan baik — yang paling efektif. Bertrand menemukan kategori ini paling menarik "karena mereka menyiratkan bahwa pers, profesional dan publik dapat bergabung bersama untuk pengendalian kualitas " (Bertrand, 2003, hal 23).

Akan tetapi, mekanisme akuntabilitas media yang dijelaskan di atas secara teori dapat dikembangkan untuk kepentingan publik, tetapi masih berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan citra organisasi media berita yang dapat dipercaya atau berfungsi sebagai instrumen hubungan masyarakat untuk mempromosikan kepentingan internal. Kecenderungan seperti itu telah didokumentasikan dalam studi sebelumnya tentang ombudsman berita dan studi tentang surat-surat dari pemimpin redaksi menanggapi kritik publik (Ettema & Glasser, 1987; Groenhart, 2009; Nemeth, 2003).

Argumen ini telah dibahas lebih lanjut dalam kritik terhadap teori stakeholder manajemen manajemen. Kritikus berpendapat bahwa pilihan untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dan menemukan kompromi antara pemangku kepentingan pada kenyataannya sering digantikan oleh strategi rekonsiliasi dan integrasi untuk mempromosikan "politik patriotik" (Blattberg, 2004).

Oleh karena itu, menarik untuk ditanyakan apakah alat akuntabilitas media yang berbeda benar-benar berfungsi untuk kepentingan publik dalam meningkatkan transparansi dan kinerja jurnalistik atau lebih tepatnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membela kepentingan media sendiri, yang diterima oleh pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, masuk akal untuk membahas apakah sistem yang dikembangkan dengan baik untuk akuntabilitas media pada tingkat organisasi media, yang berakar dalam pada persepsi profesionalisme jurnalistik, mungkin cukup dan mampu menyeimbangkan pengaruh penting dari sistem media yang lebih dikomersialkan dan berorientasi pasar di umum. Artikel ini berfokus pada dilema ini dengan menganalisis sikap MAS di antara editor Swedia. Bagian artikel berikut ini menjelaskan pengembangan sistem semacam itu di Swedia.

PEMBAHASAN

Model Swedia — liberalisme dan korporativisme

Swedia dicirikan oleh sistem pengaturan mandiri yang dilembagakan di pasar cetak, sejajar dengan sistem hukum dengan perlindungan konstitusionalnya yang kuat untuk kebebasan informasi dan kebebasan berbicara. Undang-Undang Kebebasan Informasi adalah yang tertua di dunia dari jenisnya, dan dimasukkan dalam konstitusi 1766. Swedia juga memiliki salah satu aturan tertua tentang praktik jurnalisisme yang baik. Dewan Pers Swedia awalnya didirikan pada tahun 1916 dan peraturannya telah diperpanjang secara teratur selama bertahun-tahun, dengan perubahan besar pada tahun 1969. Dewan Pers adalah bagian dari struktur korporatif, tidak berafiliasi dengan pemerintah tetapi dibentuk oleh industri surat kabar dan asosiasi jurnalis setelah tekanan politik, dengan tujuan untuk menangani keluhan pembaca terhadap konten di surat kabar (von Krogh, 2008b; Weibull, 2007). Pada tahun 1969, tiga organisasi pers yang kuat datang dengan suara bulat mengusulkan agar Ombudsman Pers diangkat oleh pers, dengan tambahan beberapa anggota masyarakat untuk menjadi anggota Dewan Pers. Setelah negosiasi yang hampir formal dengan parlemen, organisasi pers setuju untuk menjadikan ombudsman sebagai Ombudsman Pers untuk Publik (tidak ditunjuk hanya oleh pers) dan untuk memberlakukan sanksi moneter bagi pelanggaran Kode Etik (von Krogh, 2008b).

Dalam selang waktu sejak awal 1970-an, pedoman tersebut telah diformalkan dan diadopsi oleh Pressens Samarbetsnämnd, Kelompok yang terdiri dari Persatuan Jurnalis, Persatuan Penerbit Surat Kabar, Persatuan Penerbit Majalah, dan Perkumpulan Penerbit (PK). Penyiar layanan publik Swedia juga mematuhi kode tersebut. Menurut Konstitusi Swedia, hanya satu orang per surat kabar yang dapat dihukum karena konten yang diterbitkan di surat kabar itu, dan itulah orang yang akan dihukum. dilaporkan oleh surat kabar sebagai yang bertanggung jawab oleh undang-undang pers (biasanya pemimpin redaksi). Sistem yang sama berlaku untuk kritik dari Dewan Pers, yang berarti jurnalis perseorangan tidak dimintai pertanggungjawaban. Sekitar tahun 1990, sistem swa-regulasi yang dilembagakan ini dikritik oleh sejumlah editor yang menganggapnya terlalu kaku dan semilegal. Beberapa perubahan dalam Kode Etik dilakukan yang memberikan kelonggaran lebih kepada editor dan editor berpengalaman ditunjuk untuk Press Ombudsman. Pers partai telah layu, parlemen tidak ikut campur dengan perubahan, dan aspek komersial menjadi semakin penting (Weibull & Börjesson, 1995). Setelah 1990, sejumlah sistem akuntabilitas yang tidak dilembagakan dikembangkan. Berbagai pemangku kepentingan (asosiasi pengusaha, serikat pekerja, organisasi sosial seperti Palang Merah dan LSM lainnya) memulai berbagai lembaga studi media; jejaring sosial para aktivis telah dibuat dan beberapa majalah dan situs web yang membahas masalah media diluncurkan (von Krogh, 2008b).

Memeriksa sikap editor

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas implementasi dan efektivitas MAS di pers Swedia dengan menganalisis sikap editor terhadap sistem tersebut. Tiga pertanyaan penelitian diajukan:

RQ1: Bagaimana editor memberi peringkat pada sistem akuntabilitas yang berbeda?

RQ2: Perbedaan apa dalam peringkat editor yang muncul antara internal, eksternal, dan sistem akuntabilitas kooperatif?

RQ3: Jenis kritik media apa yang dianggap editor sebagai yang paling efektif?
Secara metodologis, data dalam penelitian ini didasarkan pada survei pos.

Survei tersebut diadakan selama musim dingin tahun 2006-2007 dari berbagai sektor pasar media Swedia. Dalam artikel ini, kami membahas tanggapan dari pemimpin redaksi pers harian. Responden diminta untuk menilai pentingnya 34 contoh sistem akuntabilitas pada skala 5 poin mulai dari +3 (sangat penting) hingga - 1 (tidak penting sama sekali). Kode Etik dan Dewan Pers Nasional tidak dimasukkan dalam perbandingan ini, begitu pula koreksi yang dipublikasikan dan Editor Pembaca. Namun, sistem akuntabilitas ini menjadi subyek pertanyaan terbuka dalam survei dan dievaluasi secara lebih rinci, meskipun tidak secara eksplisit dibandingkan dengan 34 sistem lainnya. Sikap yang dilaporkan sendiri mungkin mengandung bias atas apa yang dianggap benar secara profesional. Ini adalah batasan yang melekat pada metode ini. Tetapi pada saat yang sama, masih belum jelas sikap apa yang " benar " tentang mekanisme akuntabilitas ini.

Pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana di 18 dari 24 surat kabar terbesar Swedia (sirkulasi 34.000–420.000 eksemplar) menanggapi. Secara keseluruhan, surat kabar menanggapi mencakup 86% dari total 24 surat kabar yang beredar dan 75% judulnya. Mereka mungkin dianggap sebagai perwakilan dari grup harian Swedia. Beberapa rincian dari kategori pers dalam survei dibahas di bagian berikut.

Makalah Metropolitanmorning dengan sirkulasi lebih dari 83.000 eksemplar

Kuesioner itu ditujukan kepada lima editor-in-chief. Empat orang menanggapi, baik secara pribadi atau bersama dengan seorang eksekutif bawahan. Keempat surat kabar tersebut menyumbang 89% dari total sirkulasi kategori pada tahun 2006.

Koran pagi regional atau lokal dengan sirkulasi lebih dari 34.000 eksemplar

Kuesioner dikirim ke 17 surat kabar dalam kategori ini. Dua belas menjawab, mewakili 70% dari total sirkulasi kategori tersebut.

Makalah malam yang didistribusikan secara nasional

Kuesioner dikirim ke dua surat kabar dalam kategori ini; keduanya menanggapi. Bersama-sama, mereka memiliki sirkulasi 770.000 eksemplar.

Kontrol dan kualitas penting

Pertama, temuan-temuan terkait kajian kuantitatif 34MAS, kemudian temuan-temuan aspek kualitatif Kode Etik, Dewan Pers / Ombudsman Pers, Ombudsman Berita, dan koreksi. Terakhir, kami menyajikan hasil mengenai persepsi efektivitas sistem akuntabilitas. Saat menyajikan hasil survei dari 34 sistem yang berbeda (von Krogh, 2008a, 2008b; lihat juga Lampiran untuk daftar lengkap), kami menggunakan divisi yang diperkenalkan sebelumnya ke dalam sistem internal, eksternal, dan kooperatif (Bertrand, 2000, 2003, 2008), di mana editor menjalankan berbagai tingkat pengaruh. Tingkat tertinggi kendali editor dapat ditemukan dalam mekanisme internal, terendah dalam aktivitas eksternal, dengan sistem kerja sama di antara keduanya. Bertrand tidak membedakan subkategori, tetapi dalam konteks ini kami merasa berguna untuk memisahkan antara mekanisme internal di tingkat industri surat kabar (nasional) dan di

tingkat ruang berita (lokal). Dalam kategori terakhir, kami juga membedakan antara mekanisme ruang berita yang secara halus mengarah ke luar ke publik dan mekanisme pemberitaan yang secara halus mengarah ke dalam ke staf.

Hasil studi secara keseluruhan menunjukkan bahwa evaluasi editor terhadap sistem akuntabilitas berbeda-beda - 0,06 dan 2,28 (pada skala 5 poin dari 1 hingga 3), untuk mekanisme tunggal dan nilai rata-rata untuk semua 34 MAS adalah 1,28.

Sikap terhadap mekanisme internal

Skor rata-rata untuk mekanisme internal adalah 1,31; kira-kira sama dengan nilai untuk semua 34 sistem. Tetapi ketika membagi mekanisme internal menjadi beberapa subdivisi, perbedaan dalam sikap editor menjadi jelas lebih dihargai (rata-rata 1,85) daripada yang dikendalikan dalam industri tetapi di luar ruang berita, kadang-kadang bahkan oleh pesaing (rata-rata rata-rata 1,01). Subkelompok yang paling disukai oleh editor adalah mekanisme ruang berita yang ditujukan ke ruang berita; tindakan seperti memastikan bahwa wartawan menggunakan akurat. Namun, kritik media, bahkan ketika dilakukan dalam industri, tidak dihargai (misalnya, program khusus dari penyiar publik, rata-rata antara 1,06 dan 0,94), sedangkan pelatihan internal dalam pelaporan investigasi lebih populer (rata-rata 1,94).

Sikap terhadap kode, dewan, dan koreksi

Ketika editor diminta untuk merumuskan pandangan mereka tentang beberapa sistem menyeluruh dengan kata-kata mereka sendiri, mereka menyatakan dukungan untuk Kode Etik Profesional Nasional, untuk Ombudsman Pers untuk Umum / Dewan Pers, dan untuk Ombudsmen Berita (di organisasi berita). Dukungan untuk koreksi lebih bernuansa. Semua editor mengklaim kepentingan mereka, tetapi 80% dari mereka tidak ingin memublikasikannya pada posisi terkemuka di makalah mereka. Editor sesuai dengan Kode Etik Profesional, yang dirumuskan oleh organisasi media pusat, yang sangat penting atau sangat penting bagi pekerjaan jurnalis mereka. Mereka merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat kita tempuh, prinsip-prinsip yang telah dibahas secara menyeluruh dan telah berfungsi sejak lama (Editor, harian metropolitan). Mereka memberikan " panduan yang baik ", mungkin meningkatkan kredibilitas media di mata publik, dan menjauhkan legislator, tetapi bisa lebih ketat; 50% editor berpikir bahwa kode tersebut terlalu lemah atau tidak jelas dan 6 dari 10 ingin melihat revisi dibuat. Beberapa orang berpikir itu perlu lebih dipasarkan ke publik.

Para editor menyatakan persetujuan yang kuat dari Ombudsman Pers dan Publik serta Dewan Pers Nasional.

Kita tahu bahwa ada yang mengawasi jika kita tidak berperilaku. Mereka teliti dalam menangani pengaduan, menjelaskan keputusan mereka dan kontak yang baik untuk pembaca pengadu (Editor, harian regional). Kompas mengetahui bahwa seseorang sedang mengawasi kita, " dan " mencegah kita mengambil jalan pintas " adalah beberapa komentar lainnya. Ketika diminta untuk menjelaskan kelebihanannya, editor menyebutkan bahwa sistem tersebut sudah mapan dan memiliki legitimasi yang tinggi. Murah dan sederhana bagi penggugat, prosedurnya teliti, dan melindungi kepentingan mereka yang rentan (terutama anak-anak). Dengan demikian, ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang bagi perusahaan media yang semakin kuat. Namun, editor juga mengenali kesalahan dalam sistem. Hal yang lemah di mata mereka adalah

bahwa prosesnya terlalu lambat, terkadang menyendiri, terkadang kuno dan tidak fleksibel, dan terlalu bergantung pada individu mana yang menjunjung tinggi posisi ombudsman. Sebagian besar editor percaya bahwa sistem tersebut sangat penting bagi publik; sebuah "katup pengaman". Beberapa orang takut publik menganggapnya tidak berdaya dan terlalu erat terkait dengan bisnis surat kabar. Para redaksi terbagi atas isu perluasan ruang lingkup Dewan Pers dan mengintegrasikannya dengan persoalan etika media di sektor penyiaran (sebagian layanan publik); 50% editor menentang proposal ini dan 50% dari mereka akan menyambut reformasi seperti itu. Para editor lebih bersatu melawan sanksi yang lebih keras; 70% dari responden menentang menaikkan jumlah yang dibayarkan oleh "berdosa" ke Dewan Pers.

Ombudsman Berita atau Editor Pembaca — posisi tersebut memiliki nama yang berbeda, tetapi idenya adalah bahwa perusahaan media atau meja berita menunjuk seseorang untuk mengajukan pengaduan dari pembaca / pendengar / pemirsa, menyelidiki kasus yang lebih penting, dan menulis tentang mereka di dalamnya. perusahaan dan / atau publik; 80% editor mendukung sistem dan beberapa menekankan peran Ombudsman yang lebih netral:

Media besar memiliki kekuatan yang besar dan peran Reader's Ombudsman berhubungan dengan posisi kekuasaan tersebut. Pembaca bisa mengeluh dan terkadang mendapat dukungan. Ombudsman adalah seseorang yang mendengarkan dan merenung, seseorang yang belum menjadi bagian dari keputusan yang sedang diperdebatkan. (Editor, metropolitan harian)

Namun, beberapa redaksi yang kurang antusias khawatir bahwa fungsinya bisa merosot menjadi PR belaka. Penting untuk dicatat bahwa dukungan sistem ini lebih bersifat teori daripada praktik karena hanya satu surat kabar Swedia yang mencoba fungsi tersebut selama survei, dan kemudian meninggalkannya.

Koreksi dikatakan penting, tetapi sebaiknya tidak terlalu terlihat. Hanya 20% editor dalam studi ini setuju dengan kritik di luar pers, yang lebih suka melihat koreksi dikumpulkan dan dicetak di tempat tertentu. Koreksi itu penting, apa yang kita tulis harus benar. Kami merasa bahwa koreksi adalah milik departemen tempat kesalahan dipublikasikan. (Editor, metropolitan harian) Kesimpulannya, koreksi, menurut editor, diperlukan untuk menjaga "kualitas arsip." Mereka juga penting bagi pembaca: "Orang melihat bahwa kami mengakui kesalahan kami, yang menumbuhkan kepercayaan pada apa yang kami lakukan," seperti yang dikatakan salah satu editor.

Efektivitas kritik media

Kuesioner tersebut juga berisi pertanyaan terbuka tentang jenis kritik apa yang dianggap paling efektif oleh responden untuk menunjukkan kelemahan dan meningkatkan kualitas media. Komentar dari pembaca adalah tema umum di bagian ini:

Kritik media paling efektif muncul ketika banyak pembaca yang kesal dengan artikel yang sama. (Editor, harian regional) Seorang editor tabloid menekankan arus e-mail harian dari pembaca, dan memberikan contoh berurusan dengan pemberitaan surat kabar yang agresif dan masif tentang dua anggota pemerintah yang baru-baru ini ditunjuk yang terlibat dalam skandal kecil. Ketika surat kabar mulai menerbitkan berita tentang dugaan keterlibatan kakek-nenek politisi, pembaca memberikan sinyal yang kuat: Kotak surat saya terisi dengan sangat cepat dengan pesan yang sama: Anda telah melewati batas. Sudah cukup. (Editor, tabloid malam). Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa editor di koran pagi dalam banyak kasus cenderung menekankan kualitas

komentar, daripada kuantitas Itu harus kredibel dan sungguh-sungguh, serius. (Editor, harian regional)

Para editor di koran pagi menawarkan kriteria kualitatif untuk penilaian komentar mereka; komentar yang mereka dengarkan dan temukan berpengaruh: Mereka harus " spesifik dan konstruktif ", " langsung ke pokok permasalahan, dengan contoh-contoh konkret, " dan " beralasan dan dengan informasi yang dapat diverifikasi. "

Dari swa-regulasi hingga koregulasi

Studi kasus tentang sikap editor Swedia terhadap MAS yang berbeda ini menegaskan bahwa mereka umumnya lebih menyukai mekanisme yang dianggap lebih sebagai peraturan "dari dalam ke luar" daripada peraturan "di luar". Ketika editor memilih dan memilih, dimensi hubungan masyarakat dari akuntabilitas media terlihat jelas. Dimensi kontrol juga terlihat jelas. Sistem akuntabilitas yang paling sering diabaikan oleh editor adalah sistem di mana mereka hanya menghasilkan sedikit pengaruh atau yang memiliki risiko tertinggi bagi mereka karena didasarkan pada inisiatif di luar organisasi media. Akibatnya, ketika keduanya digabungkan, seperti dalam kritik media eksternal dan radikal, peringkatnya berada di skala paling bawah.

Tetapi bahkan ketika editor memiliki kendali penuh, mereka tidak hanya memilih ukuran yang memberi mereka PR yang baik, karena ada juga dimensi ambisi kualitas dalam sikap mereka. Ini mungkin berarti kemungkinan untuk kombinasi mekanisme baru yang ditingkatkan kualitas dengan beberapa ukuran kontrol editorial. Tindakan kooperatif, yang disukai oleh Bertrand (2003), mengandung kemungkinan ini. Redaksi tampaknya menekankan pentingnya sistem lama Dewan Pers, Ombudsman Pers, dan Kode Etik. Mereka bersedia menggunakan sistem lain untuk mendengarkan pandangan eksternal atau untuk memperkuat kualitas editorial, tetapi kemudian mereka lebih suka cara memaksimalkan pengaruh mereka atas hasil dan meminimalkan risiko kritik keras.

Secara historis, sistem koperasi yang paling mapan, Dewan Pers dan Ombudsman Pers, menemui beberapa perlawanan tetapi sekarang diterima sepenuhnya meskipun kurangnya kontrol dan risiko PR yang buruk. Ombudsman Pers adalah orang dalam, berpengalaman dalam kritik konstruktif yang merupakan prasyarat untuk efektivitas, menurut mayoritas editor.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pandangan editor tidak semuanya homogen. Beberapa di antaranya cenderung kritis terhadap sikap umum pers dalam menangani pengaduan masyarakat; 30% bahkan menyambut sanksi yang lebih kuat dalam sistem pengaturan mandiri. Beberapa dari mereka juga bergerak lebih cepat dari yang lain dan melakukan eksperimen dengan transparansi di blog editor dan jurnalisme tentang proses editorial dan pengambilan keputusan mereka sendiri. Berbagai kemungkinan untuk meningkatkan kualitas editorial melalui peningkatan transparansi editorial dan peningkatan partisipasi pembaca telah diperdebatkan di antara para editor. Lebih mudah bagi ruang redaksi tunggal atau perusahaan media untuk mengubah kebiasaan lama dan mencoba cara-cara baru daripada bagi seluruh sektor media.

Pada saat yang sama, penting untuk dicatat bahwa secara umum kemampuan editor untuk secara eksklusif memilih opsi akuntabilitas menjadi lebih terbatas karena tren globalisasi media, teknologi baru, dan upaya regulasi media di tingkat internasional. Studi ini menunjukkan bahwa sikap kelompok redaksi yang tidak homogen tidak hanya

didasarkan pada pertimbangan kehumasan. Swa-regulasi nasional jelas tidak dimainkan secara berlebihan di Swedia, tetapi mungkin dilengkapi dengan sistem baru akuntabilitas media, yang dibentuk oleh berbagai aktor baik di dalam maupun di luar media. Kita mungkin melihat perkembangan diferensiasi yang lebih tinggi dari langkah-langkah akuntabilitas untuk berbagai organisasi media sebagai bagian dari merek mereka dan sebagai fungsi komunikasi mereka dengan publik.

Mengapa sikap editor seperti itu?

Praktik jurnalistik profesional, yang didasarkan pada otonomi editorial dan akuntabilitas, bukan hanya hasil tradisi media nasional, atau prinsip pengaturan sendiri yang tetap selamanya. Sebaliknya, kondisi jurnalisme kontemporer sebagian besar dibentuk oleh banyak kepentingan yang berbeda dan menyatu dalam masyarakat, yang terlibat dalam proses yang kompleks termasuk pengaturan formal dan informal pada tingkat kelembagaan dan sosial yang berbeda. Akibatnya, pendekatan tata kelola media dapat memfasilitasi analisis tentang kekuatan relatif kepentingan yang mencoba memengaruhi jurnalisme saat ini.

Namun, MAS tidak dibentuk dalam interaksi statis antara aktor masyarakat dan penerbit yang berbeda. Dalam perspektif yang dinamis, masuk akal untuk percaya bahwa editor mencoba memanfaatkan karakteristik sistem akuntabilitas yang berbeda dengan cara memaksimalkan kemungkinan untuk mengontrol proses dan mencapai tujuan yang berbeda dengan mempertahankan kontrol tersebut. Studi tentang sikap editor Swedia ini menegaskan bahwa dimensi kontrol terbukti ketika menganalisis preferensi mereka untuk MAS yang berbeda.

Namun, masuk akal untuk menanyakan apakah kontrol selalu merupakan faktor kunci bagi editor saat menilai MAS. Satu dimensi kontrol berkaitan dengan kemungkinan ketakutan di antara editor yang disurvei akan kehilangan kontrol editorial internal dari pihak luar. Namun, aspek ini tidak terlalu diartikulasikan dalam jawaban. Ada beberapa referensi tentang perlunya menjauhkan pengaruh negara dengan memoles fungsi pengaturan-diri, tetapi tidak banyak dan diutarakan dengan tenang. Selain itu, ada lebih sedikit ketakutan akan kehilangan pengaruh kontrol editorial internal yang diungkapkan oleh para kritikus atau anggota masyarakat.

Aspek-aspek ini sejalan dengan argumen yang diungkapkan oleh pakar media Denis McQuail (2004), yang mencapai kesimpulan bahwa kebebasan media dan akuntabilitas media tidak saling bertentangan, dan akuntabilitas juga tidak identik dengan kontrol. Yang menjadi masalah adalah dua fenomena yang berbeda secara konseptual. Pengendalian melibatkan penggunaan kekuasaan untuk mencapai hasil atau perilaku yang diinginkan dari pihak lain (atau menempatkan batas tindakan). Akuntabilitas berkaitan dengan mengamankan dari seorang aktor penjelasan atau pembenaran tindakan. Tidak seperti kontrol, ini terjadi setelah kejadian. Jelas antisipasi akuntabilitas berpotensi menghambat tindakan dan dapat dirancang sebagai metode kontrol, tetapi antisipasi konsekuensi bersifat intrinsik untuk tindakan yang rasional, apalagi bertanggung jawab. (McQuail, 2004, hlm.26)

Tampaknya, risiko kehilangan kendali editorial internal tampaknya tidak menjadi isu yang menonjol dalam agenda redaksi. Meski demikian, ada kemungkinan redaksi lebih tertarik untuk mengontrol sistem akuntabilitas itu sendiri. Ini mengarah kembali ke kategori sistem internal, eksternal, dan kooperatif dan sikap editor terhadap sistem tersebut. Mengenai sistem internal, sistem perusahaan / ruang berita secara alami adalah

yang paling dapat dikontrol oleh editor, dan mereka juga dijunjung tinggi. Editor mengontrol koreksi dan menolak memusatkannya ke satu tempat di koran. Sistem industri nasional berarti kontrol yang lebih sedikit untuk editor individu dan mereka juga kurang populer, kecuali kode etik nasional. Dalam sistem kerja sama, editor memiliki kontrol yang lebih sedikit atas mekanisme internal, tetapi karena mereka adalah bagian dari kerja sama, mereka masih memiliki pengaruh. Para editor bersikap positif terhadap panel pembaca (di mana mereka dapat mengontrol pertanyaan-pertanyaan yang diajukan), terhadap sistem yang ditetapkan dengan Dewan Pers / Ombudsman Pers dan agak positif terhadap komentar pembaca (yang mereka kendalikan; untuk menerbitkan atau tidak mempublikasikan).

Terakhir, sistem eksternal adalah sistem yang paling sedikit mengontrol editor. Tetap saja, mereka menyukai beberapa di antaranya, seperti pelatihan jurnalisisme dan penelitian media, tetapi mereka berbeda kurang tertarik dengan berbagai macam kritik media eksternal. Jadi, tampaknya ada kasus untuk perspektif kontrol dalam menjelaskan sikap editor terhadap sistem akuntabilitas yang berbeda.

Karenanya, ada alasan untuk bertanya mengapa editor memberi peringkat sistem dengan cara ini dan tujuan apa yang mungkin ada di balik kendali sistem akuntabilitas ini. Setidaknya ada tiga interpretasi berbeda yang diberikan ketika menganalisis jawaban dari editor: (a) mereka ingin meningkatkan kualitas editorial, (b) mereka ingin mencapai efek public relations yang positif, atau (c) mereka ingin menghindari efek public relations yang negatif.

Kualitas editorial tampaknya memainkan peran penting dalam aspek ini. Fakta bahwa tiga dari empat sistem yang paling populer adalah sistem internal perusahaan (dengan tingkat kontrol yang tinggi) yang mengarah ke dalam (dan karenanya tanpa efek PR yang terlihat) tampaknya memperkuat interpretasi ini. Sistem eksternal yang disukai oleh editor (metode berbeda untuk pendidikan jurnalis lebih lanjut) memiliki potensi lebih untuk meningkatkan kualitas editorial daripada mempromosikan PR. Namun pertimbangan kualitas editorial tidak lepas dari dimensi PR yang positif. Mendanai dan mendukung sistem nasional Ombudsman Pers untuk publik dan dewan pers nasional dapat diartikan sebagai kepedulian terhadap individu yang rentan dan sebagai tindakan industri yang bertanggung jawab. Hal yang sama berlaku untuk ombudsman berita lokal. Di satu sisi, mereka bisa mengartikulasikan, mempertajam, dan mempublikasikan kritik yang bersumber dari publik. Di sisi lain, mereka mungkin membuat ruang redaksi terlihat bertanggung jawab. Banyak editor mendukung fungsi ini hanya dalam teori, mengetahui bahwa itu mahal dan mungkin memperburuk ruang redaksi. Sistem internal perusahaan yang mengarah ke luar (peringatan tentang sumber dan penerbitan materi tambahan) juga berbagi dualisme ini; mereka berkontribusi pada kualitas editorial yang lebih tinggi dan menjadi PR positif. Sistem kerja sama (seperti panel pembaca dan neraca editorial) dapat membantu editor memutuskan masalah kualitas editorial serta masalah hubungan masyarakat. Sistem baru seperti situs web literasi media dan kuesioner kepada orang-orang yang disebutkan dalam berita juga memiliki dua kemungkinan.

Terakhir, banyak indikasi yang menggambarkan bahwa upaya menghindari PR negatif merupakan tujuan yang sangat relevan bagi redaksi. Separuh bagian bawah dari daftar 34 sistem diisi dengan sistem yang sedikit atau tidak dapat dikontrol oleh editor dan dapat merusak mereka dan ruang redaksi mereka dengan kritik media semi-internal atau eksternal. Perlawanan untuk mempublikasikan koreksi yang menonjol dan mempromosikan jurnalisisme media internal dapat dengan baik diartikan sebagai keengganan editor untuk terlihat buruk di mata publik (dan rekan-rekan mereka) dan

sebagai perlawanan di antara mayoritas editor untuk memprovokasi "perhatian publik negatif yang tidak perlu dengan tindakan mereka sendiri. Dibutuhkan tingkat kepercayaan tertentu pada kemampuan organisasi sendiri dan berkat kritik untuk melihat hasil yang mungkin dalam hal kualitas media yang tinggi dan kepercayaan media.

KESIMPULAN

Swedia memiliki tradisi yang luar biasa dari sistem pengaturan diri yang dilembagakan dan kesadaran yang luas di antara editor surat kabar tentang kode dan standar etika profesional. Dari perspektif tata kelola media, terlihat jelas bahwa editor mencoba menyeimbangkan antara kualitas komersial dan editorial yang ketat pertimbangan saat mengevaluasi MAS yang berbeda. Jadi, prioritas editor di bidang ini tampaknya terkait antara tanggung jawab publik dan posisi hubungan masyarakat. Meskipun data empiris kami berasal dari tahun 2006/2007, kesimpulan ini tidak dapat dikesampingkan oleh realitas permasalahan ekonomi beberapa tahun terakhir. Editor Swedia terus bereksperimen dengan berbagai langkah akuntabilitas dan bahkan mendiskusikan perluasan sistem pengaturan mandiri. Selain itu, pembiayaan sistem sedang ditinjau. Diskusi ini tidak dipicu oleh ancaman intervensi negara, tetapi harus dilihat sebagai cara untuk menekankan keprihatinan atas legitimasi editorial, untuk alasan komersial dan editorial, di lingkungan media baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardoel, J. (2007). Pengaturan tata kelola media yang menyatu di Eropa. Di G. Terzis (Ed.), *Tata kelola media Eropa: Dimensi nasional dan regional*. Bristol: Akal.
- Bardoel, J., & d'Haenens, L. (2004). Media bertemu dengan warga: Di luar mekanisme pasar dan regulasi pemerintah. *Jurnal Komunikasi Eropa*, **19** (2), 165–194.
- Bennett, WL, Lawrence, RG, dan Livingstone, S. (2007). *Ketika pers gagal, politik kekuasaan dan media berita dari Irak ke Katrina*. Chicago: Pers Universitas Chicago.
- Bertrand, CJ (2000). *Etika media & sistem akuntabilitas*. Brunswick, NJ: Transaksi Penerbit.
- Bertrand, CJ (Ed.) (2003). *Gudang demokrasi: Sistem akuntabilitas media*. Cresskill, NJ: Hampton Press.
- Bertrand, CJ (2008). *M * SEBUAH * S di dunia saat ini: Tinjauan tentang akuntabilitas media sistem*. Dalam T. von Krogh (Ed.), *Akuntabilitas media saat ini. . . dan besok: Memperbarui konsep dalam teori dan praktik*. Göteborg:
- Nordik. Blattberg, C. (2004). *Dari pluralisme hingga politik patriotik, praktikkan terlebih dahulu*. Oxford: Oxford University Press.
- Orang Kristen, CG, Glasser, TL, McQuail, D., Nordenstreng, K., & White, RA (2009). *Teori normatif media: Jurnalisme dalam masyarakat demokratis*. Chicago: Pers Universitas Illinois.

- Ettema, JS, & Glasser, TL (1987). Akuntabilitas publik atau hubungan masyarakat? Koran ombudsmen mendefinisikan peran mereka. *Jurnalisme* Setiap tiga bulan, **64** (1), 3–12.
- Freedman, D. (2008). *Politik kebijakan media*. Cambridge: Polity Press.
- Groenhart, H. (2009). Strategi media berita dalam akuntabilitas jurnalistik: Pemimpin redaksi di pembelaan pengaduan masyarakat. Makalah dipresentasikan pada konferensi IAMCR Human Rights Communication, Meksiko 2009.
- Hardy, J. (2008). *Sistem media Barat*. London: Routledge.
- Hallin, DH, & Mancini, P. (2004). *Membandingkan sistem media: tiga model media dan politik*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jenkins, H. (2006). *Budaya konvergensi, di mana media lama dan media baru bertabrakan*. New York: New York University Press.
- Krogh, T. (Ed.) (2008a). *Ākuntabilitas media saat ini. dan besok*. [http://www.jmk.su.se/contents/sidor/info/in motion.php](http://www.jmk.su.se/contents/sidor/info/in%20motion.php)
- Krogh, T. (2008b). *Mediernas Ansvarighet — akuntabilitas media på svenska*. Stockholm: Sim (o).
- Weibull, L. (2007). *Negara-negara model media korporatis Eropa Utara / demokratis*. Di G. Terzis (Ed.), *Tata kelola media Eropa. Dimensi Nasional dan Regional*, Bristol: Akal.
- Weibull, L., & Börjesson, B. (1995). *Publicistiska seder*. Falun: Tidens förlag.
- Wyss, V., & Keel, G. (2009). *Tata kelola media dan manajemen kualitas media: Teoritis konsep dan contoh empiris dari Swiss*. Dalam A. Czepek, M. Hellwig, & E. Nowak (Eds.), *Kebebasan pers dan pluralisme di Eropa: Konsep & kondisi*. Bristol: Akal.